



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Skripsi milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGELOLAAN PASAR RAKYAT BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT PADA PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI DESA  
BUATAN II KECAMATAN KOTO GASIB**

**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan Untuk Memproleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH)*



**OLEH:**

**SUHENDRA**

**NIM: 11627104458**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2021 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **“Pengelolaan Pasar Rakyat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Pada Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib”** yang ditulis oleh:

Nama : SUHENDRA  
 NIM :11627104458  
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2021

Pembimbing Skripsi

  
**DR. H. Maghfirah, MA**  
 NIP. 19741025 200312 1 002

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PENGELOLAAN PASAR RAKYAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SIAK NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT PADA PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI DESA BUATAN 11 KEMACATAN KOTO GASIB"* yang ditulis oleh :

Nama : **SUHENDRA**  
 NIM : 11627104458  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin / 9 Agustus 2021  
 Waktu : 13:00 WIB  
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Agustus 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Asril, SH., MH**

Sekretaris  
**Syamsurizal, SE., M.Sc. Ak**

Penguji I  
**Dr. Hj. Hertina, M.Pd**

Penguji II  
**Dr. Muhammad Darwis, SH**



Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Zulkifli, M. Ag**

NID. 19741006 200501 1 005





## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pengelolaan Pasar Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Pada Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib. Permasalahan terkait pengelolaan pasar antara lain permasalahan dan citra negatif pasar tradisional.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan pasar rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pada pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib, serta apa kendala pengelolaan pasar rakyat di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan pasar rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Pada Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib, serta untuk mengetahui apa kendala pengelolaan pasar rakyat di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

Hasil dalam penelitian ini adalah pengelolaan Pasar Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Pada Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib tidak terlaksana dengan baik. Pengawasan pengelolaan Pasar Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Pada Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib tidak berjalan, karena pasar-pasar yang tidak terdaftar pada Dinas perdagangan dan Perindustrian tidak diawasi karena pasar tersebut tidak terdaftar. Sehingga sampai saat ini tidak ada Satuan Polisi Pamong Praja atau Dinas terkait melakukan pengawasan di pasar rakyat yang ada di Desa Buatan II dari awal pasar berdiri hingga sekarang. Adapaun yang menjadi kendala pengelolaan pasar rakyat di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib diantaranya adalah; (i) kurangnya sosialisasi; (ii) minimnya anggaran; dan (iii) kurangnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan pasar.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengelolaan Pasar Rakyat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Pada Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Zaburi dan Ibunda Erwi Yuniza serta ke-tiga saudara penulis yaitu Adik saya Moh. Rovandes Mahezza, Moh. Altofa Mahezza, Khalis Agha Mahezza yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.

2. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas M.Ag Selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Firdaus, S.H.,M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
6. Bapak Dr. H., Maghfirah, M.A selaku pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak H. Rahman Alwi, Lc., M.A selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2017, terkhusus Kelas Ilmu Hukum D, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, April 2021

Penulis,

**SUHENDRA**  
**NIM: 11627104458**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Buatan Kabupaten Siak .....	15
1. Bidang Pendidikan .....	19
2. Bidang Ekonomi.....	19
3. Partisipasi Dalam Perjuangan Kemerdekaan .....	19
B. Kondisi Geografis dan Demografis.....	21
1. Kondisi Geografis .....	21
2. Gambaran Umum Demografis .....	22
C. Strategi Dan Arah Kebijakan Kampung.....	25
1. Strategi .....	25
2. Arah Kebijakan .....	28
3. Indikator Kinerja Untuk Strategi.....	30
D. Prioritas Kampung.....	32
E. Visi Dan Misi Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak .....	34
1. Visi .....	34
2. Misi.....	34
F. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Buatan II.....	36
G. Struktur Organisasi Pasar Rakyat Desa Buatan II .....	36



### BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pemrintah Daerah .....	37
1. Pengertian Pemerintah Daerah .....	37
2. Asas-asas Pemerintah Daerah .....	41
3. Dasar Hukum Pemerintah Daerah .....	43
4. Fungsi Pemerintah Daerah .....	44
B. Kebijakan .....	45
1. Pengertian Kebijakan .....	45
2. Fungsi Kebijakan .....	46
C. Konsep Pengelolaan Pasar .....	46
1. Pengertian Secara Umum .....	46
2. Fungsi Pelaksanaan Pengelolaan .....	48
D. Pasar .....	51
1. Pengertian Pasar .....	51
2. Pengertian Pasar Tradisional .....	54
E. Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pada Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan .....	58
F. Teori Pengawasan .....	61
1. Pengertian Pengawasan .....	61
2. Bentuk-bentuk Pengawasan .....	62
3. Fungsi Pengawasan .....	64
4. Asas-asas Pengawasan .....	66
5. Dasar Hukum Pengawasan .....	68

### BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Pasar Rakyat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Pada Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib .....	71
--	----

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Bagaimana Pengawasan Pengelolaan Pasar Rakyat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Pada Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib .	75
C. Faktor Yang Menyebabkan Tidak Terjalankannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Pada Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib.....	79
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

Table I.1	Populasi dan Sampel.....	10
Tabel II.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kampung Buatan II Tahun 2018 .....	23
Tabel II.2	Jumlah Penduduk berdasarkan Struktur Usia Di Kampung Buatan II Tahun 2018 .....	23
Tabel II.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kampung Buatan II Tahun 2018 .....	24
Tabel II.4	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kampung Buatan .....	24
Tabel II.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kampung Buatan II Tahun 2018.....	25
Tabel II.6	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Buatan II.....	36
Tabel II.7	Struktur Organisasi Pasar Rakyat Desa Buatan II.....	36



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan tempat berkumpulnya penjual dan pembeli sekaligus pusat kegiatan ekonomi. Dilihat dari bentuknya pasar di bedakan menjadi dua yakni pasar tradisional dan pasar modern. Perbedaan dari kedua pasar tersebut terlihat dari tempat, pelayanan, harga, dan barang yang diperjualbelikan. Perdagangan yang dilakukan di pasar tradisional maupun modern sama-sama bertujuan untuk mencari keuntungan. Seperti definisi dari perdagangan itu sendiri yakni pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.<sup>1</sup>

Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila sila ke lima. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaa saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

---

<sup>1</sup> Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2002), h. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Manusia telah mengenal dan melakukan kegiatan jual beli sejak mengenal peradaban sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Dalam kegiatan jual beli, keberadaan pasar merupakan salah satu hal yang paling penting karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan tersebut selain menjadi salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat disuatu wilayah.<sup>2</sup>

Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya sudah berlangsung sejak manusia itu ada. Salah satu kegiatan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut adalah memerlukan adanya pasar sebagai sarana pendukungnya.<sup>3</sup>

Aktivitas usaha yang dilakukan di pasar pada dasarnya akan melibatkan dua subyek pokok, yaitu produsen dan konsumen. Kedua subyek tersebut masing-masing mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pembentukan harga barang yang ada di pasar. Hal ini didasari atau didorong oleh faktor perkembangan ekonomi yang awalnya hanya bersumber pada problem untuk memenuhi kebutuhan hidup (kebutuhan pokok).

Manusia sebagai makhluk sosial dalam perkembangannya juga menghadapi kebutuhan sosial untuk mencapai kepuasan atas kekuasaan, kekayaan dan martabat. Agar pasar dapat berperan secara normal (alamiah) dan terjamin keberlangsungannya, di mana struktur dan mekanismenya dapat terhindar dari perilaku-perilaku negatif para pelaku pasar, Keberadaan pasar

<sup>2</sup> A.A Ketut Sri Candrawati, *Pasar Modern dan pasar Tradisional Dalam Gaya Hidup Masyarakat Kabupaten Tabanan Provinsi Bali*, (Bali : STIA : 2010), h. 224.

<sup>3</sup> Philip Kotler & A.B Susanto, *Manajemen Pemasaran Di Indonesia analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya pasar tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat disuatu wilayah.

Kegiatan pasar tradisional digambarkan dengan kesibukan yang padat dengan kegiatan tawar menawar di sana-sini. Kegiatan tawar menawar yang ramai ini menjadi salah satu ciri khas pasar tradisional. Manajemen melibatkan aktivitas-aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Fungsi-fungsi manajemen antara lain perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actating*) dan pengendalian (*controlling*).

Berdasarkan manajemen pengelolaan, pasar dibagi menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skal kecil, menengah, dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Kemudian terkait dengan perzinan pasar diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan diwajibkan memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundangan.
2. Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang diatur lebih lanjut dengan Perkada.

Adapun permasalahan terkait pengelolaan pasar tradisional antara lain: (1) permasalahan dan citra negatif pasar tradisional umumnya terjadi akibat kurang disiplinnya pedagang, pengelola pasar yang tidak profesional, dan tidak tegas dalam menerapkan kebijakan atau aturan terkait pengelolaan operasional pasar, (2) masalah internal pasar seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim, menjamurnya para pedagang kaki lima yang mengurangi pendapatatan pedagangm dan minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional<sup>4</sup>.

Pengelolaan pasar yang baik dan professional diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar tradisonal, meningkatkan keuntungan serta dapat menjamin kelangsungan dari pasar itu sendiri. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 2 yang berisikan tentang hal-hal berikut:

1. Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya.

---

<sup>4</sup> Nur Faeni Ulyati, *Strategi Pemasaran Pedagang Pasar Tradisional Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), h 176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat.
  - b. Menyediakan areal parkir paling sedikit Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional.
  - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
3. Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain. Bagian Kedua Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Selain dari Peraturan Presiden yang mengatur tentang tata ruang pasar yang nyaman dalam bertransaksi jual beli ada aturan yang mengaturnya seperti Peraturan Daerah Siak Nomor 11 Tahun 2017, terdapat di dalam Bab 1 Pasal 2 Perda Siak Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi:

- a. Menata dan mengatur keberadaan dan pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar mampu bersaing secara sehat, beseinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- b. Memberikan perlindungan kepada pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- c. Memberdayakan pasar rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri.
- d. Mewujudkan lingkungan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang bersih, sehat (*hygienes*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan.
- e. Menjamin terselenggaranya kemitraan antar pelaku usaha pasar rakyat dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan berdasarkan prinsip kemaanan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan, dan.
- f. Mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai usaha terwujudnya tata niaga dan pola distribusi daerah yang mantap, lancar, efesien, dan berkelanjutan.<sup>5</sup>

Tetapi pasar tradisional yang ada di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib sangat bertolak belakang dengan apa yang sudah diatur di dalam peraturan presiden dan peraturan daerah yang mana pasar ini jauh dari kata tersusun rapi dan nyaman. Pasar ini dipenuhi dengan sampah dan letak pedagang yang tidak teratur yang mengakibatkan jalan tidak dapat dilewati. Selain itu, tata letak parkir untuk kendaraan bermotor berada di badan jalan yang mengakibatkan antrian. Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti kendala apa yang membuat Peraturan Daerah Siak Nomor 11 Tahun 2017

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat.

tidak terlaksana pada pasar rakyat yang berada di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini ialah : pengelolaan pasar rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan pasar rakyat di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan pasar rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pada pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib?
2. Bagaimana pengawasan pengelolaan pasar rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Pada Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib?
3. Apa kendala pengelolaan pasar rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pada pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib?

## D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang di rumuskan diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pasar rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pada pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pengelolaan pasar rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Pada Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib?
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pasar rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pada pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

#### a. Secara Teoritis

Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan,

---

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sehingga terjadi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pelaksanaan pengelolaan pasar rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pada pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib.

#### b. Secara Praktis.

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan pasar rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pada pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib.

#### c. Secara Akademis.

Penelitian ini di harapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

### E. Metode Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dan pengambilan data dilakukan pada Pasar Rakyat Di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib. Penulis memilih penelitian di lokasi ini karena mudah dijangkau oleh penulis, dan substansinya belum pernah diteliti sebelumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.<sup>7</sup>

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk mengambil sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam teknik pengambilan sampel ini penulis menggunakan teknik “*sampling purposive*”.<sup>8</sup> Adapun *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>9</sup>

Adapun Populasi dan Sampel yang diambil dalam penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Tabel populasi dan sampel**

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL
1	Pegawai Dinas Perindag Kab. Siak	20 orang	2 orang
2	Pegawai Satuan Pamong Praja Kabupaten Siak	16 orang	1 orang
3	Aparatur Desa Buatan II	15 orang	2 orang
4	Pengurus Pemuda Desa Buatan II	10 orang	1 orang
5	Pengelola Pasar Pedagang	6 orang 200 orang	1 orang 20 orang
Jumlah		204 orang	27 orang

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta;Raja Grafindo,2011), h.122

<sup>8</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 81

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 84

### 3. Jenis dan Sumber data

#### a. Data Primer

Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek penulisan. Dengan cara mewawancarai yang di tujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.<sup>10</sup>

#### b. Data Skunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karena penelitian memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian yang dilakukan.<sup>11</sup>

#### c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan skunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi dalam sebuah penelitian. Adapun tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : observasi, wawancara, serta dokumentasi.

<sup>10</sup> Umar, *Metode Riset Bisni*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.56

<sup>11</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv Al-Fabeta 2005). h.

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

b. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti lakukan dengan menggunakan rekaman, dengan tokoh masyarakat, kepala desa dan kepala pasar.

4. Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskritifkan secara menyeluruh, kemudian sumber data tersebut digunakan untuk menjawab masalah penelitian

## F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib.

## **BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang konsep pemerintah daerah, konsep kebijakan, konsep pengelolaan pasar, pasar, serta teori pengawasan.

## **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimana pengelolaan pasar rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pada pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib, bagaimana pengawasan pengelolaan pasar rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Pada Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib, serta kendala



pengelolaan pasar rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pada pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib?

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Kampung Buatan II Kabupaten Siak

Dahulu jauh sebelum berdirinya kerajaan Siak, terdapatlah sebuah kerajaan yang bernama Gasib. Kerajaan ini memang dikenal oleh kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Selain karena ia memiliki khazanah negri yang subur, ia juga memiliki seorang putri kerajaan yang cantik, yang bernama Putri Kaca Mayang.<sup>12</sup>

Pada suatu ketika, seorang Raja Aceh Utara singgah di negri ini dengan menyamar bersama rombongan dagang. Terdengarlah cerita tentang kemolekan Sang Putri Kaca Mayang, sehingga tertariklah hatinya untuk memiliki putri tersebut, dan diputuskanlah niat untuk meminangnya. Namun nasib tidak seperti yang diharapkan, “ingin diawak bukan di urang”, pinangan ditolak dengan alasan karena Sang Putri anak satu- satunya, alias anak tunggal, sedangkan kerajaan Aceh dengan Gasib sangat jauh terpisah.

Berawal dari sinilah Raja tidak dapat menerima atas penolakan tersebut. Ia memutuskan niat untuk kembali pulang ke Aceh mrngumpulkan kekuatan untuk menyerang kerajaan Gasib yang menolak pinangannya.<sup>13</sup>

Tersebutlah kisah tentang kampong yang bernama Buatan. Berasal dari sebuah anak sungai yang dibuat oleh Raja Utara (Aceh) yang ingin menerang Gasib. Anak sungai ini dijadikan tempat pemberhentian dan

<sup>12</sup> Profil Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib

<sup>13</sup> *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mengatur siasat. Selain karena ia menembus ke sungai Jantan (sungai Siak sekarang) dan ke Gasib, ia juga agak tersembunyi dan jauh dari perkiraan orang-orang Gasib pada waktu itu.

Masapun berlalu, datanglah di kampung yang belum punya nama ini Cak Mamat (Jayo) dari negeri Terengganu yang sebelumnya menetap di Siak. Hal ini terjadi tatkala air pasang mulai surut. Cik Mamat (berhenti sejenak) di anak sungai yang kira-kira besar 4 meter ini ketika hendak bertandang ke negeri Payung Sekaki Senapelan. Entah mengapa hatinya jadi tertarik di saat melihat ke darat, sehingga ringanlah kakinya untuk menginjak tanah kampung ini. Setelah melihat terpikirlah hatinya, kalau-kalau tanah disini sangat cocok untuk berladang padi.

Cik Mamat pun melanjutkan pengembaraannya ke Payung Sekaki Senapelan. Setelah bebrapa lama dinegeri ini hatinya masih terkesan dengan tanah di kampung persinggahannya. Rupanya tiupan angin kampung tersebut telah berhasil menarik hati dan pikirannya. Semangatnya semakin menggebu, maka diputuskanlah niat untuk bertandang di negeri tersebut.

Kembalilah dia ke Siak. Di Siak dia mengumpulkan kawan-kawan dan keluarga untuk berladang dikampung tempat persinggahannya tadi. Maka berladanglah mereka dikampung itu sambil menetap disana. Untuk mengairi ladang mereka, digunakanlah air sungai yang hingga kini di kenal dengan sungai Liingkar Padi. Ternyata memang benar, tanahnya memang subur, sehingga mereka memperoleh hasil yang memuaskan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya berdatangan pula keluarga yang lainnya dari Gasib dan kampung sekitarnya, Tapung Kiri, Pelalawan.

Menurut para tertua dikampung ini, sekitar tahun 1876, penduduknya telah berkisar 15 KK. Lama-kelamaan penduduknya semakin bertambah, dan kampung yang tadinya tidak punya nama, jadilah sebuah ucapan (Lisan) rakyat dengan sebutan “Kampung yang dibuat”, dan pada akhirnya berubah dengan sebutan yang simple (mudah diucapkan dan nyaman didengar), yaitu “Buatan”.

Walaupun penduduk buatan sudah bertambah semakin banyak, namun belum ada pemerintahan desa, pamong, atau Tuk penghulu. Oleh sebab itu kampug ini berada dibawah pemerintahan Batin.

Pada tahun 1922, oleh pihak kerajaan Siak supaya Buatan dibentuk penghulu kampung. Diangkatlah Al-Degul oleh kerajaan sebagai penghulu pertama. Setelah itu diganti oleh saudara iparnya Tuk Penghulu Bujang, dan ini tidak bertahan lama. Tetapi pada waktu itu di Buatan telah ada Distrik oleh kerajaan Siak. Oleh datuk Distrik Buatan ia bermohon kepada Sultan agar dicari pengganti jabatan penghulu tersebut. Maka diambillah seorang keluarga Batin Senapelan untuk menjabat penghulu kampung, yaitu al-Tuit. Disamping itu dia juga dinobatkan menjadi batin Pnadan. Oleh sebab itu jadilah dua gelar dibuatnya yaitu Batin Tuit dan Batin Pandan.<sup>15</sup>

Dalam pemerintahan Batin Pandan ini, Buatan dan kampung sekitarnya semakin maju, seperti kampung Penyengat (Buatan I) dan Rantau

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Panjang. Dan kampung ini dahulunya masih berinduk ke Buatan. Oelh kerajaan dan Batin Gidan (Batin Gasib dahulu), Batin Tuit diberi hutan wilayah Gasib, yaitu dari sungai Gasib sampai ke batas Antan-antan Dayun (Kilometer 55 sekarang)

Distrik-distrik Buatan sebagai pembentu untuk wilayah Siak sebenarnya telah didirikan pada tahun 1930 M. Disini juga berdiri kantornya dengan dikepalai oleh seorang Datuk dengan bergantian, antara lain :

1. Datuk Aris
2. Datuk Sulaiman
3. Datuk Kasim
4. Datuk T. Jang
5. Datuk T. Mansur

Pada tahun 1935 adanya KOPUN (kupon) yaitu pendaftaran luas dan jumlah hasil kebun getah (karet rakyat) yang dapat ditukar dengan uang dari pemerintahan Belanda. Maka untuk pengumpulan ini ada di daerah Siak dan pembantu di Buatan. Untuk wilayah Buatan, mencakup kampung Maredan, Tualang, Pinang Sebatang, Kuala Gasib, Air Pungai (Air Kuning Gasib), Teluk Rimba, Penyengat, Rantau Panjang, Puing (Pangkalan Pisang), Lubuk Dalam, Rwang Kawo, Sialang Kawan (Kerinci Kanan), Poteh (Kerinci Kiri), dan juga kampung-kampung di sungai Mandau.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

## 1. Bidang Pendidikan

Untuk mencerdaskan pengetahuan rakyat, Batin Tuit dan Datuk-datuk Distrik rupanya tidak tinggal diam. Mereka mengerti benar akan perkara ini, karena majunya suatu bangsa ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Maka pada tahun 1935 dengan kebijaksanaan Batin dan datuk-datuk tersebut, didirikanlah Sekolah Rakyat (SR), dan atas perintah Sultan Siak pada saat itu yaitu sampai kelas III (tiga).

## 2. Bidang Ekonomi

Sebagai umumnya rakyat Indonesia pada waktu itu, masyarakat Buatanpun tergolong masyarakat Agraris yang mayoritas para petani. Untuk menjual hasil pertaniannya, dan karena Buatan sebagai pembantu dari pemerintahan Siak, maka oleh Sultan Syarif Qasim II diperintahkan untuk diadakan pasar. Maka didirikanlah kios pasar, dan setelah diresmikan hari pasar pada waktu itu jatuh pada hari Sabtu. Oleh sebab itu jadilah Buatan sebagai pusat perbelanjaan dan perdagangan bagi kampung-kampung di pesisir Sungai Siak dan Kampung-kampung di Petalangan.<sup>17</sup>

## 3. Partisipasi dalam Perjuangan Kemerdekaan

Setelah pecah perang dunia II Indonesia diduduki oleh Jepang selama 3,5 tahun. Setelah Jepang dikalahkan oleh sekutu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai persiapan pertahanan kedaulatan Republik Indonesia, maka

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipersiapkanlah pemuda-pemuda untuk menjadi pagar negara (Putra) berlatih tentara di Siak. Untuk kampung Buatan juga dikirim pemuda-pemudanya antara lain Al-Khalid, Abdul Majid, Al-Ujang Linjo, Hasan Basri, Bahrum Tuit, dan lain-lain.

Pada masa agresi Belanda ke II, kota Siak diduduki Belanda maka para pejabat pemerintahan Siak dan ada yang dari Pekanbaru ada yang mengungsi ke Buatan dengan membuat benteng-benteng dari tanah yang digali. Bersama masyarakat, para datuk-datuk diungsikan di Lingkar Padi di hulu sungai antara sungai Buatan dan Lingkar Padi. Sedangkan para tentara berjaga-jaga di benteng Buatan.

Datuk-datuk yang mengungsi antara lain :

1. Datuk Wan Abdul Rahman (Almarhum)
2. Datuk Entul (Almarhum)
3. Datuk Wan Ghalib
4. Dan lain-lain

Sedangkan tentara dikomandokan oleh :

1. T. Makmun
2. Anuar Diman
3. Dan ada lagi lainnya

Sedangkan anggota polisi dahulu datangnya yaitu :

1. Polisi Oktovia
2. Polisi Silalahi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal yang sangat kritis ini perjuangan bersama rakyat, senang-susah bersama rakyat, apa yang dimakan rakyat itu pula yang dimakan Datuk-datuk dan rombongan tentara. Dan semua ini diatur oleh kebijaksanaan Datuk Batin Tuit dan dibantu oleh Penghulu Ambah (Penghulu Sengkemang), dan M. Saman.<sup>18</sup>

Setelah keadaan aman, Indonesia kembali berdaulat maka Batin Tiut menyerahkan kekuasaan Penghulunya kepada Hasab Basri (Ayahanda dari H. Thamrin), sedangkan Tuk Batin Pandan tetap dipimpin oleh Batin Tiut.<sup>19</sup>

## B. Kondisi Geografis Dan Demografis

### 1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kampung Buatan II terletak antara 100° 45-100°52 Bujur Timur dan 0° - 0°32 Lintang Utara. Kampung Buatan II termasuk salah satu Kampung di Kecamatan Kota Gasib yang menjadi wilayah Kabupaten Siak dengan batas-batas.<sup>20</sup>

Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Rantau Panjang dan Kampung Sengkemang

Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Buatan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Pangkalan Pisang

Sebelah Selatan dengan kampung Tunang Kecamatan Siak

Adapun luas wilayah Kampung Buatan II sekitar  $\pm 2.51 \text{ km}^2$  atau 37,54 % dari luas wilayah Kecamatan Koto Gasib sekitar  $\pm 10,542,67$

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> *Ibid.*,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

km<sup>2</sup>. Jarak Ibu Kota provinsi  $\pm$  125 km ditempuh dalam waktu 2 jam, dari ibu kota Kabupaten  $\pm$  83 km dan berkedudukan disebelah Utara Ibu kota Kecamatan. Secara administratif wilayah kampung Buatan II terbagi dalam 4 wilayah dusun, 6 rukun warga dan 19 rukun tetangga. Sebagian besar kampung ini merupakan daerah rendah hingga menengah, dibagian barat yang berbatasan dengan Desa Buatan I terdapat rawa-rawa dengan ketinggian sekitar 15 meter diatas permukaan laut. Kampung ini beriklim tropis temperatur rata-rata pada siang hari 31-32° C dan pada malam hari 20-22° C, kelembapan 90-100 dan rata-rata curah hujan berkisar 780-2461 mm/tahun.

Secara geogromofologi Kampung Buatan II merupakan datarn tidak bergelombang dan wilayah bagian Barat agak rawa. Di kampung Buatan II terdapat beberapa sungai yaitu sungai pengurang, sungai buatan, sungai ketopang, sungai naga, dan bebrapa sungai kecil yang bermuara kepadanya. Sungai-sungai yang terdapat di Kampng Buatan II ini sebagai sumber air bersih dan budi faya ikan.<sup>21</sup>

## 2. Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Kampung, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi jumlah total 3103 jiwa. Dengan demikian rincian penduduk berjenis laki-laki berjumlah 1516 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1587 jiwa. Data

<sup>21</sup> *Ibid.*,

penduduk saat ini diambil dari blanko yang diisi oleh ketua RT dilingkungan masing-masing didapatkan data seperti yang ditabel berikut.

**Tabel II.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Kampung Buatan II Tahun 2018**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-laki	1516	49. %
2	Perempuan	1587	51. %
	Jumlah	3103	100. %

**Tabel II.2**  
**Jumlah Penduduk berdasarkan Struktur Usia**  
**Di Kampun Buatan II Tahun 2018**

No	Jumlah Usia	Jumlah	Presentase %
1	00-05 TH	239	6,8
2	06-10 TH	240	7,1
3	11-15 TH	237	6,9
4	16-20 TH	294	8,8
5	21-25 TH	250	7,5
6	26-30 TH	248	7,5
7	31-35 TH	226	6,6
8	36-40 TH	262	7,7
9	41-45 RH	246	7,3
10	46-50 TH	255	7,5
11	51-55 TH	215	6,4
12	56-60 TH	216	6,4
13	60 KEATAS	173	5,2

Sumber : Monografi Kampung Buatan II Tahun 2018

Dari total jumlah penduduk Des buatan II, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk yang berusia >60 tahun, merupakan jumlah 5,2% usia 0-5 tahun 6.8 %, adapun penduduk usia produktif pada usia antara 16-60 tahun di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampung Buatan II jumlahnya cukup signifikan, yaitu 1.317 jiwa atau 70.9 % dari total jumlah penduduk.<sup>22</sup>

**Tabel II.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Di Kampung Buatan II Tahun 2018**

No	Kelompok Usia	Jumlah	Presentase %
1	Tamat Taman Kanak-kanak	62	1.8
2	Tamat Sekolah SD	1.469	54
3	Tamat Sekolah SMP	950	28.5
4	Tamat Sekolah SMA	369	11,07
5	Tamat Perguruan Tinggi	150	4.5
	Jumlah	2.534	100%

Sumber dari : Monografi Kampung Buatan II Tahun 2012

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa dikampung Buatan II kebanyakan penduduk yang hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar 54.0 % dan pendidikan menengah SMP 28.5 dan SMA 11,079% sementara yang dapat menikmati pendidikan di perguruan tinggi hanya 4.5%.<sup>23</sup>

**Tabel II.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencanharian**  
**Kampung Buatan II**

No	Macam Pekerjaan	Jumlah	Presentase %
1	Pegawai Negeri Sipil	91	10.0
2	TNI	1	0.1
3	Karyawan Swasta	95	13.9
4	Wiraswasta/pedagang	95	15.1
5	Tani	280	35.6
6	Pertukangan	30	4.6
7	Buruh Tani	88	10.8
8	Nelayan	35	5.4
9	Pemulung	1	0.1
10	Jasa	25	3.0

Sumber : Monografi Kampung II Buatan

<sup>22</sup> Ibid.,

<sup>23</sup> Ibid.,

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi di Kampung Buatan II jumlah penduduk kehiduannya bergantung di sektor pertanian dan peternakan 35.6% dari total jumlah penduduk.

**Tabel II.5**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**  
**Kampung Buatan II Tahun 2018**

No	Agama	Jumlah	Presentase%
1	Islam	3072	97.2
2	Katholik	-	-
3	Protestan	9	2.28
4	Budha	22	2.0
5	Hindu	-	-
	Jumlah	3103	100%

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kampung Buatan II yang beragama Islam mendominasi jumlah 97.2% dari total 3103 jumlah penduduk. Pemeluk Agama Budha 2.6% dan Agama Protestan 0.2%.<sup>24</sup>

### C. Strategi Dan Arah Kebijakan Kampung

#### 1. Strategi

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pembangunan Kampung Buatan II dalam 5 tahun ke depan. Strategi disusun berdasarkan beberapa faktor internal dan eksternal desa. Strategi sebagai pendekatan dasar akan mampu mendongkrak perubahan pemerintahan secara bermakna. Oleh karena itu, pilihan strategi yang tepat dalam membangun Kampung Buatan II menjadi sangat penting. Dalam kaitan ini digunakan dua pendekatan implementasi sebagai titik

<sup>24</sup> *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

angkat pembangunan Kampung Buatan II yang akan dilaksanakan yaitu<sup>25</sup>:

- a. Pendekatan partisipatif : mewujudkan masyarakat kampung yang mandiri dan sejahtera melalui proses pemberdayaan, dengan mengedepankan prinsip demokratisasi, kesetaraan dan keberpihakan pada masyarakat.
- b. Pendekatan komprehensif, yaitu membentuk struktur ruang Kampung Buatan II yang strategis sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah/kawasan, secara berkeadilan, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Kedua pendekatan ini diimplementasikan secara sinergis, terintegrasi, bertahap dan berkesinambungan.

Strategi merupakan alat penghubung antara Visi dan Misi, arah kebijakan dan pokok-pokok kebijakan pembangunan dalam satu paket dengan strategi disetiap bidang pembangunan. Strategi dilahirkan dari pengamatan dari setiap bidang sehingga secara umum bersifat mempunyai strategi disetiap bidang pembangunan kampung Buatan II.

Strategi tersebut meliputi<sup>26</sup>:

- 1) mensosialisasikan undang-undang serta aturan hukum dengan mengikut sertakan kelembagaan terkait, yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan peraturan, untuk mendukung tercapainya kepastian, keharmonisan kehidupan hukum ditengah-tengah masyarakat sehingga tercipta keadaan yang aman, tertib dan tentram (HUKUM dan TRAMTIB).

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Mengembangkan sistem manajemen kepegawauan, struktur organisasi dan administrasi pelayanan publik yang efisien, transparan, akuntabel, dan profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai *good governance* untuk meningkatkan kualitas fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat (PEMERINTAHAN).
- 3) Mengembangkan sistem manajemen keuangan yang mendukung peningkatan potensi penerimaan Kampung, pengelolaan, dan pemanfaatan keuangan masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab yang tercipta melalui sistem pengawasan keuangan ketat (PEMERINTAHAN)
- 4) Membantu usaha-usaha pembangunan ekonomi yang berbasis masyarakat dengan membangun kemitraan untuk menciptakan jaringan usaha kuat, serta mampu mengacu peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja (EKONOMI-TENAGA KERJA).
- 5) Membangun komunikasi antara masyarakat Kampung Buatan II yang bersifat heterogen dengan memperhatikan budaya masing-masing daerah sehingga seminimal mungkin dapat menekan terjadinya konflik-konflik horizontal (SOSIAL).
- 6) Menumbuhkan kembangkan tujuan pembangunan sosial dengan mengoptimalkan peran pemerintah, swasta dan dukungan masyarakat untuk menghindari terjadinya penurunan moral aparat Kampung dan Masyarakat dengan mengoptimalkan pemahaman, penghayatan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari (SOSIAL AKHLAK).

7) Mengoptimalkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah kependudukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan penduduk serta mengendalikan arus perpindahan penduduk ke Kampung Buatan II (SOAIL KEPENDUDUKAN).

8) Berusaha mengajukan usulan pembangunan sarana dan prasarana fisik sehingga mampu mengatasi persoalan-persoalan seperti kemacetan, banjir, banyaknya pedagang yang berjualan tidak pada tempat yang dibenarkan (SARANA PRASARANA SOSIAL).

## 2. Arah kebijakan

Perjalanan pembangunan Kampung Buatan II mengalami pasang surut yang cukup panjang. Berdasarkan penggalan waktu (periodisasi), perjalanan pembangunan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut<sup>27</sup>:

a. periode 2004-2006 masa pemindahan kepemimpinan pemerintah Kampung yang baru dari pemerintahan kampung yang lama, masa ini program pembangunan Kampung mengalami stagnasi serta tidak tersusunnya program perencanaan pembangunan Kampung yang matang.

b. Periode 2006-2007, masa pemulihan kehidupan pemerintahan Kampung, baik dibidang manajemen pemerintahan dan pembangunan serta

---

<sup>27</sup> Ibid.,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemberdayaan masyarakat. Peningkatan pelayanan public, peningkatan ketertiban umum.

- c. Periode 2007-2009, masa pemantapan pelayanan pemerintahan Kampung, menciptakan aparat pemerintahan Kampung yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan inspiratif, memelihara kondisi sosial politik dan kamtibmas yang kondusif serta memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan untuk menuju penguatan fundamental sosial ekonomi menuju kemandirian. Berdasarkan perjalanan pembangunan, fakta dan keadaan, serta permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi pemerintah Kampung Buatan II dan masyarakat dalam membangun Kampung Buatan II, dapat dirumuskan arah kebijakan umum pembangunan Kampung Buatan II untuk lima tahun kedepan sebagai berikut<sup>28</sup>:

Arah pembangunan Kampung Buatan II 2004-2010

- a. periode 2004-2010, diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan, mengikut sertakan masyarakat dalam program pembangunan desa, pengadaan sarana dan prasarana dalam skala kecil yang sangat dibutuhkan sesuai dengan kemampuan Kampung, mendirikan sarana pendidikan taman kanak-kanak, PAUD, dan penerbitan lokasi pasar Kampung Buatan II, perbaikan dan peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana Kampung.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

### 3. Indikator Kinerja Untuk Strategi

Strategi digunakan oleh pemerintah Kampung Buatan II dalam 5 tahun masa kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi dan arah kebijakan pembangunan. Kinerja pemerintah Kampung dapat dievaluasi dari keberhasilan pemerintah desa untuk menerapkan strategi, sedemikian rupa hingga dapat mencapai tujuan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan strategi ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja. Secara umum, indikator kinerja yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut<sup>29</sup>:

#### a. Bidang hukum, ketentraman ketertiban dan kesatuan bangsa

1. Tegaknya supermasi hukum diwilayah Kampun Buatan II
2. Menigkatnya kesadaran masyarakat Kampung Buatan II akan aturan-aturan dalam hokum
3. Terwujudnya keharmonisan di masyarakat, shingga tercipta rasa aman, tertib dan tentram, serta menguatnya rasa kebangsaan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Bidang Pemerintahan**

1. Terciptanya sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai *good governance*.
2. Terwujudnya sistem pemerintahan yang efisien, efektif dan profesional dengan dukungan sistem keuangan daerah dan sistem informasi yang lebih handal

**c. Bidang Ekonomi**

1. Meningkatnya kepercayaan dunia usaha untuk berinvestasi di Kampung Buatan II
2. Tercapainya pembangunan ekonomi berbasis masyarakat
3. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja, dalam menghadapi persaingan dan kemiskinan
4. Menurunnya angka pengangguran

**d. Bidang Kependudukan**

1. tersedianya data dasar kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan
2. Terjadinya tertib administrasi kependudukan
3. Semakin terkontrolnya jumlah penduduk Kampung Buatan II
4. Meningkatnya kualitas tenaga kerja

**e. Bidang Sosial Budaya**

1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang mendukung lingkungan dan sumber daya alam

2. Menurunnya jenis dan jumlah permasalahan akibat rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana seperti banjir dan lain sebagainya

#### **D. Prioritas Kampung**

Didalam pembangunan, manusia mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting. Pada satu sisi, manusia adalah subjek pembangunan yang bertindak sebagai pelaku (stakeholder), pada sisi lain, manusia juga merupakan sasaran yang harus menikmati hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, segala aktifitas pembangunan yang dilaksanakan di Kampung Buatan II pada hakekatnya berusaha untuk peningkatan kualitas manusia dan pemberdayaan.<sup>30</sup>

Sehubungan dengan pemikiran tersebut, pada hakekatnya perencanaan strategis pembangunan Kampung Buatan II disarankan pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan serta penggunaan anggaran yang pro publik.

Berdasarkan pada kondisi, permasalahan, potensi dan peluang yang dimiliki kampung Buatan II, dengan tetap memandang semua bidang pembangunan dalam kedudukan yang penting, ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut<sup>31</sup>:

1. peningkatan pemahaman nilai-nilai luar agama dan budaya Melayu serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. memberikan kesadaran masyarakat tentang kepastian hukum dan budaya hukum melalui sosialisasi hukum dan pemahaman tentang hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia
3. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur Kampung dalam Rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan pelayanan publik yang lebih berkualitas, profesional, transparan dan akuntabel
4. meningkatkan pengelolaan keuangan, aset dan usaha Kampung dalam rangka peningkatan kemandirian Kampung
5. membantu basisi ekonomi masyarakat melalui penguatan jaringan produksi dan distribusi, peningkatan peran serta usaha mikro, UKM, dan koperasi
6. memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam rangka mengurangi konflik sosial dan penyakit masyarakat (pekat)
7. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa dalam rangka peningkatan pelayanan dan daya dukung kampung melalui pembangunan jalan lingkar kampung, penataan pasar Kampung, dan perbaikan akses jalan produksi perkebunan masyarakat
8. peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan kesadaran budaya sehat (PHBS) serta peningkatan pelayanan posyandu berkualitas, serta peningkatan pengadaan sarana air bersih masyarakat peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

peningkatan kualitas pelayanan pendidikan PAUD, peningkatan kualitas kesejahteraan tenaga kerja pengasuh PAUD.<sup>32</sup>

## E. Visi dan Misi Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib.

### 1. Visi

Diketahui bersama bahwa untuk lima tahun periode 2009-2007 ini lah visi kampung Buatan II<sup>33</sup>:

**“Terwujudnya Masyarakat Buatan Ii Mandiri Dan Sejahtera Dengan Pengembangan Perkebunan Masyarakat Dan Industri Perdagangan Ditengah Kehidupan Masysrakat Kampung Buatan Ii Yang Agamis, Berilmu, Dan Berbudaya Melayu”**

Sejalan dengan senmangat dan nilai-nilai luhur visi dan misi Kabuapten Siak, untuk menjadikan Kanupaten Siak sebagai Kabupaten terbaik di Provinsi Riau Tahun 2016.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kampung Buatan II yang ingin diwujudkan adalah Kampung Buatan II yang mandiri, dinamis, dan sejahtera. Yang semuanya itu akan diwujudkan melalui visi

### 2. Misi

Misi Kampung Buatan II merupakan turunan dari visi Kampung Buatan II. Misi merupakan tujuan jangka pendek dari misi menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain, Misi Kampung Buatan II merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran

<sup>32</sup> Ibid.,

<sup>33</sup> Ibid.,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan dimasa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Kampung Buatan II.

Adapun dalam meraih visi Kampung Buatan II seperti yang telah disebutkan diatas. Dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi Kampung Buatan II yaitu :

1. Membangun perkebunan masyarakat untuk selalu memenuhi usaha industri kecil dan perdagangan
2. Memfasilitasi mengarahkan masyarakat untuk menggalakkan usaha industro kecil dan perdagangan
3. Memfasilitasi, memberdayakan masyarakat untuk selalu mematuhi aturan kehidupan sesuai dengan agama yang dianit
4. Menfasilitasi, memberdayakan serta membangun sarana pendidikan bagi masyarakat
5. Mengayomi dan menggalakkan masyarakat untuk melestarikan budaya melayu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

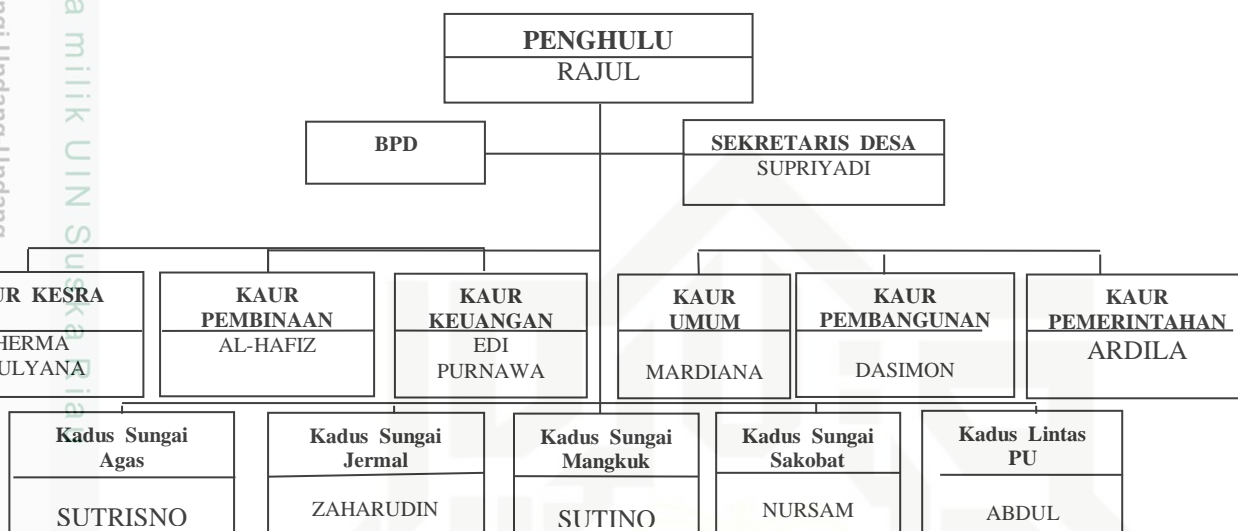
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Buatan II

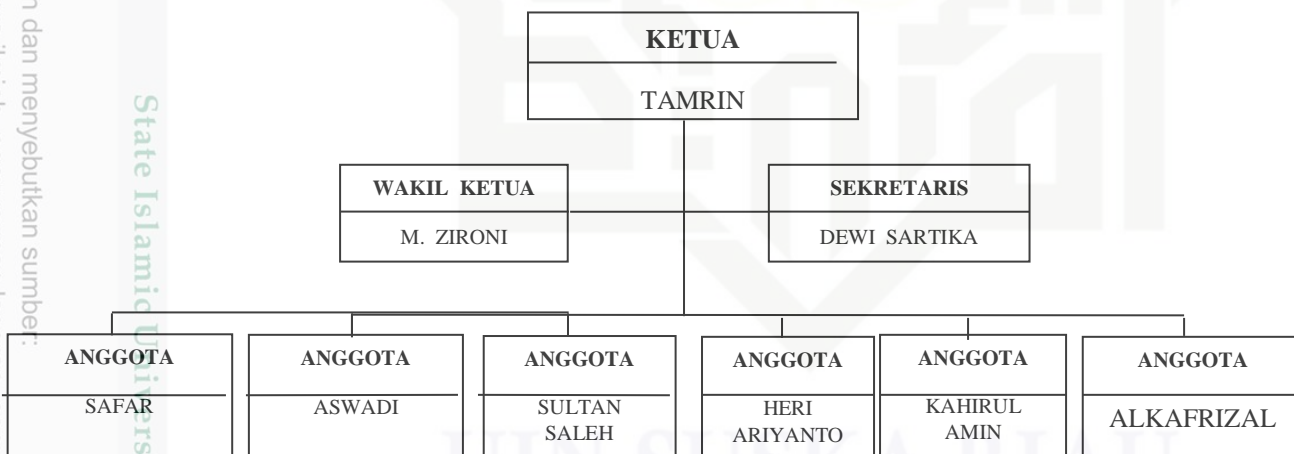
**Tabel. II.6**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Buatan II**



Sumber : Kantor Desa Buatan II

## G. Struktur Organisasi Pasar Rakyat Desa Buatan II

**Tabel. II.7**  
**Struktur Organisasi Pasar Rakyat Desa Buatan II**



Sumber : Kantor Desa Pasar Rakyat Desa Buatan II



### BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pemerintah Daerah

#### 1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah aparat yang menjalankan pemeritahan yang mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri.<sup>34</sup> Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang.

Perubahan ke 4 (empat) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi: “Negara Kesatuan Repulik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propisi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”. Sedang Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.<sup>35</sup>

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Keberadaan desentralisasi lebih dipahami pemerintah daerah sebagai kewajiban daripada sebagai hak. Prinsip-prinsip yang terkait pemerintah daerah merupakan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan,

<sup>35</sup> M. Rendi Aridhayandi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 48, No.4 Tahun 2018, h.884

<sup>36</sup> *Ibid.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal (1) angka (5) menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Mengenai kekuasaan pemerintahan, diuraikan dalam urusan pemerintahan. Dalam pasal 12 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dasar pengaturan Pemerintahan Daerah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18, 18A, dan 18B.<sup>37</sup>

Dari pasal-pasal tersebut dapat memberikan suatu ruang lingkup Pemerintahan Daerah yaitu Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, Kota yang dipimpin Wali Kota, dan Kabupaten dipimpin oleh Bupati. Selanjutnya Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, serta Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi

---

<sup>37</sup> M. Rendi Aridhayandi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 48, No.4 Tahun 2018, h.884

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tugas pembantuan.<sup>38</sup> Di dalam negara kesatuan, tanggungjawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah. Akan tetapi karena sistem pemerintahan Indonesia, salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal-balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.<sup>39</sup>

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi-otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan adanya lembaga-lembaga Negara atau alat kelengkapan Negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Lembaga-lembaga tersebut harus dapat membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara. Didalam pasal 18 UUD 1945 dijelaskan bahwa “Pembagian daerah atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Wilayah Indonesia dibagi

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> Azlan Thamrin, Dikutip dari Jurnal Al-Adalah: Jurnal Politik hukum dan islam, *Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan*, Vol. 4, No. 1, Januari 2019, h.43

menjadi wilayah besar dan kecil yang kemudian bersifat otonom, yaitu daerah yang bisa mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.<sup>40</sup>

## 2. Asas-asas Pemerintah Daerah

Asas-asas pemerintahan daerah terdapat beberapa asas, yaitu<sup>41</sup>:

### a. Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah.

### b. Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Desentralisasi menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan

<sup>40</sup> C.S.T Kansil, Cristine ST Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.3

<sup>41</sup> Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi pustaka, 2010). h. 122



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pemerintahan daerah tingkat tinggi kepada daerah tingkat yang lebih rendah, dengan demikian tugas, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah tersebut. Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik baik dalam bentuk satuan territorial maupun fungsional. satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan. Berkaitan dengan urusan desentralisasi, Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan “meringankan” beban pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Pusat, dengan demikian dapat lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan.

Pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di daerah kecuali dalam batas-batas yang diperlukan. Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar yaitu<sup>42</sup>:

- 1) Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan,
- 2) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan,

---

<sup>42</sup> Ibid. h. 125,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pembagian kekuasaan dan kewenangan serta,
- 4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Maka secara garis besar, asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat.

c. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan yaitu asas yang menyatakan turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.<sup>43</sup>

**3. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah**

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 126

#### 4. Fungsi Pemerintah Daerah

Pengertian fungsi yang dimaksud adalah dalam bentuk “normatif” yaitu berarti tugas atau yang berkaitan dengan jabatan publik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah. Paling tidak tiga fungsi yaitu: fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan.<sup>44</sup> Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah<sup>45</sup>:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Fungsi tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan

<sup>44</sup> Husin Ilyas, Afif Syarif dan. Netty, *Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember 2012, h.47

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 48



keuangan daerah. Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

## B. Kebijakan

### 1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.<sup>47</sup>

Dapat dikatakan bahwa kebijakan itu adalah seperangkat aturan dan prinsip-prinsip. Sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dilaksanakan sebagai sebuah kontrol untuk mencapai tujuan. Terdapat beranekaragam pengertian kebijakan sebagaimana dirangkum oleh Irfan Islamy yaitu:

1. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.

<sup>46</sup> *Ibid.*,

<sup>47</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Carl J. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

## 2. Fungsi Kebijakan

Menurut Dunn fungsi dari evaluasi kebijakan yaitu, evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan, atau dalam bahasa lain, fungsi kebijakan untuk menyediakan data dan informasi untuk memutuskan apakah mereka melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah pelaksanaan kebijakan<sup>48</sup>

## C. Konsep Pengelolaan Pasar

### 1. Pengertian Secara Umum

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan implementasi juga biasa disebut tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Menurut Nurdin Usman mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan, yaitu bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*, Bandung: Alfabeta, 2020, h. 191-192

<sup>49</sup> Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009). h.56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan atau Implementasi suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>50</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan adalah aktivitas, aksi atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau badan secara berencana yang tersusun secara matang, teratur dan terarah yang merupakan rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah Pelaksanaan pengelolaan pasar memerlukan desain kebijakan yang komprehensif dan multisektoral, karena itu perlu dilakukan pengkajian dengan menggunakan metode analisis kebijakan (*policy analysis method*), sehingga hasil studi dapat menjadi pertimbangan utama bagi perumus kebijakan dalam formulasi kebijakan. Fokus analisis adalah kebijakan apa yang perlu diambil atau dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung agar revitalisasi pasar tradisional tidak semakin memarginalkan para pedagang tradisional, tetapi justru meningkatkan daya saing mereka.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Dikutip dari situs <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1> diakses pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 02.33 WIB

<sup>51</sup> Caroline Paskarina, dkk *Laporan Penelitian Penelitian Peneliti Muda (Litmud) Unpad Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Di Kota Bandung*, Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah Universitas Padjadjaran, November, 2007. h.3

## 2. Fungsi Pelaksanaan Pengelolaan

Berikut adalah fungsi-fungsi Pengelolaan menurut para ahli<sup>52</sup>:

- a. **Planning** (Perencanaan) adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat - Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.<sup>53</sup> Koonts and Donnel mnegemukakan, *planning is the function of a manager which involves the selection from alternatives of objectives, policies, 16 procedures, and programs*. Artinya: perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan- tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program program dari alternatif-alternatif yang ada. Jadi, masalah perencanaan adalah masalah “memilih” yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.
- b. **Organizing** (Pengorganisasian) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu

<sup>52</sup> Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009). h.6

<sup>53</sup> *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut (Hasibuan). *Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together efficiently and again personal satisfactions for the purpose of achieving some goal or objectives.* (Terry). Artinya: pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.<sup>54</sup>

- c. *Actuating, Directing and Leading* (Pengarahan) adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. *Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strive to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts.* Artinya: pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

- d. **Controlling:** *Controlling is the process of regulating the various factors in enterprise according to the requirement of its plans.* Artinya: pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam

<sup>54</sup> Ibid.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rencana. *Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished* (Koontz). Artinya: pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.<sup>55</sup>

- e. **Staffing** (*Assembling resources*) adalah menentukan keperluankeperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. *Staffing* merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi.
- f. **Motivating** (Motivasi) adalah mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.
- g. **Programming** adalah proses penyusunan suatu program yang sifatnya dinamis.
- h. **Budgeting** (Anggaran) adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Dalam anggaran ini hendaknya tercantum besarnya biaya dan hasil yang akan diperoleh. Jadi anggaran harus rasional.
- i. **System** adalah suatu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya bekerja bersama sesuai dengan

<sup>55</sup> *Ibid.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

aturan yang ditetapkan sehingga membentuk suatu tujuan yang sama. Dimana dalam sebuah sistem bila terjadi satu bagian saja yang tidak bekerja atau rusak maka suatu tujuan bisa terjadi kesalahan hasilnya.

**Commanding** adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.<sup>56</sup>

- k. **Coordinating** (Koordinasi) adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen 19 (6M) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan). Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

1. **Evaluating** (penilaian) adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil- hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.<sup>57</sup>

### D. Pasar

#### 1. Pengertian Pasar

Menurut Mankiw pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah

<sup>56</sup> Ibid.,

<sup>57</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok yang menentukan permintaan terhadap produk dan para penjual sebagai kelompok yang menentukan penawaran terhadap produk.<sup>58</sup> Dengan demikian pasar yang tersedia adalah himpunan konsumen yang mempunyai: minat, pendapatan dan akses terhadap suatu tawaran pasar tertentu. Pengertian Pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu. Artinya juga di dalam pasar ini terdapat penjual dan pembeli adalah untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa.

Secara sempit pasar dapat diartikan sebagai tempat penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi jual beli atau jasa. Secara luar pasar dapat diartikan sebagai proses dimana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk mendapatkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran.

Pasar merupakan salah satu tempat atau media untuk berjual beli, dimana penjual ingin menukar barang/jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan jasa. Dengan artian yang luas maka pasar diartikan sebagai tempat dimana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menukar barang/jasa dan menetapkan harga keseimbangan sesuai penawaran dan permintaan.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Marios P, Angipora, *Dasar-dasar pemasaran*, Cet 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000). h.73-74

<sup>59</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar adalah tempat dipertemukan antara pembeli dan penjual untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang atau jasa, sedangkan industri membutuhkan karyawan atau tenaga kerja, modal, bahan baku produksi baik barang maupun jasa. Adapun penjual juga termasuk juga industri. Pekerja membutuhkan tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menjual dan menyewakan asetnya. Sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Secara umum semua orang berperan ganda yaitu sebagai penjual dan pembeli.<sup>60</sup>

Pengertian tentang pasar menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat (Permendagri, 2007). Disisi lain pengertian pasar menurut Said Sa'ad Marthon bahwa pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa; baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Sedangkan syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Pasar juga merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia (Toni, 2014).<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Istijabatul Aliyah *Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan* Cakra Wisata Vol 18 Jilid 2 Tahun 2017, h. 2



Pasar secara fisik adalah tempat pemusatan beberapa pedagang tetap dan tidak tetap yang terdapat pada suatu ruangan terbuka atau tertutup atau sebagian terbuka atau sebagian bahu jalan. Selanjutnya pengelompokan para pedagang eceran tersebut menempati bangunan-bangunan dengan kondisi bangunan temporer, semi permanen ataupun permanen.<sup>62</sup>

## 2. Pengertian Pasar Tradisional

Sebagaimana yang telah ditetapkan pada peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 112 tahun 2007 bahwasanya Pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, menengah, dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.<sup>63</sup>

Menurut Wicaksono pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Pasar tradisional cenderung menjual barang-barang

<sup>62</sup> Rismayani, *Manajemen Pemasaran*, cetakan ke enam (Bandung: mizzan, 1999), h. 61

<sup>63</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokal dan kurang ditemui barang impor, karena barang yang dijual dalam pasar tradisional cenderung sama dengan pasar modern, maka barang yang dijual pun kualitasnya relatif sama dengan pasar modern.<sup>64</sup>

Berdasarkan definisi-definisi diatas pemerintah telah mengeluarkan peraturan presiden nomor 112 tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sebagai respon terhadap makin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil menengah usaha eceran skala besar. Namun pasar tradisional perlu di berdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan satu sama lain. Adapun pasar tradisional didirikan dan dibangun dan juga dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Usaha Badan Milik Daerah, termasuk kerja sama dengan Swasta dengan tempat usaha yang bernama toko, kios, los. Hal ini disebabkan pada perkembangan pasar supaya bersaing dengan sehat.<sup>65</sup>

Pasar tradisional merupakan pasar yang memiliki keunggulan bersaing secara alamiah. Lokasinya yang strategis, are penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah, sistem tawar menawar yang menunjukkan kakraban antara penjual dan pembeli. Selain keunggulan tersebut, pasar tradisioanal/ pasar rakyat merupakan salah

<sup>64</sup><http://eprints.mercubuanayogya.ac.id/1084/2/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf>

<sup>65</sup> Heru Sulistiyo, Budi Cahyono, *Model Pengembangan Pasar Tradisional Menuju Pasar Sehat Di Kota Semarang*, Ekobis Vol, No 2, Juli 2010, h. 516

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu pendongkrak ekonomi kalangan masyarakat menengah kebawah dan jelas memberikan efek yang baik dalam kehidupan.

Pasar tradisional/pasar rakyat juga memiliki kelebihan dan kekurang, berikut urana mengenai kelebihan dan kekurangan pasar tradisional/pasar rakyat<sup>66</sup>:

a. Kelebihan Pasar Tradisional

pasar tradisional juga memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan pasar modern. Kelebihan tersebut diantaranya adalah:

- 1) Di pasar tradisional pembeli dapat melakukan tawar menawar harga dengan pedagang.
- 2) Harga yang ditawarkan cukup terjangkau.

b. Kekurangan Pasar Tradisional

Secara budaya pasar tradisional merupakan tempat publik dimana terjadi interaksi sosial pasar tradisional juga memiliki beberapa kekurangan dari pasar tradisional yang bisa anda ketahui, seperti:

- 1) Pertumbuhan ekonomi pada pasar tradisional ini cenderung lambat. Karena promosi dan inovasi tidak terlalu berpengaruh pada pasar tradisional, maka kualitas barang juga sulit untuk meningkat dan motivasi masyarakat untuk maju sangat kurang.
- 2) Barang dan jasa yang ditawarkan pada pasar tradisional juga terbatas. Hal tersebut disebabkan karena sangat bergantung pada hasil kekayaan alam yang ada pada tempat tersebut.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Tidak adanya standar baku dalam pengukuran nilai suatu barang. Perubahan pada pasar tradisional dianggap tabu, karena sangat terikat pada budaya.

c. Adapun ciri-ciri pasar tradisional diantaranya<sup>67</sup>:

- 1) Kekayaan alam dan juga tenaga fisik menjadi barang dan jasa yang diperdagangkan pada pasar tradisional.
- 2) Pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam pasar. Bahkan pemerintah hanya bertugas untuk menjaga ketertiban umum pada pasar tradisional tersebut.
- 3) Produksi dilakukan oleh rumah tangga dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- 4) Pada pasar tradisional terjadi tawar menawar terhadap harga barang yang dijual.
- 5) Pada pasar tradisional ini, rasa tolong menolong dan kekeluargaannya sangat tampak dari kehidupan masyarakatnya.
- 6) Teknik produksi maupun jual beli dipelajari secara turun menurun dari generasi ke generasi.
- 7) Pada pasar tradisional ini terikat budaya dan tradisi dalam masyarakat.
- 8) Di pasar tradisional tidak ada monopoli oleh satu produsen tertentu. Hanya di pasar tradisional inilah produsen baru bisa masuk dengan mudah. Pelayanan dan harga menjadi salah satu hal yang paling

---

<sup>67</sup> *Ibid.*



mempengaruhi penjualan. Sedangkan promosi dan juga inovasi tidak terlalu berpengaruh.<sup>68</sup>

#### **E. Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pada Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan**

Dalam sistem Pengawasan secara umum termasuk pengawasan terhadap Peraturan daerah ada dikenal dengan istilah preventif ini berasal dari kata “preventief” yang mempunyai makna suatu tindakan bersifat pencegahan artinya sebelum suatu perda diberlakukan maka dilakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan agar Perda yang bersangkutan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemebentukan Peraturan Daerah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan tingkat atasnya dan kepentingan umum.<sup>69</sup>

Dalam pengawasan Perda dapat dilakukan dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Sejak zaman indonesia baru merdeka dan diberlakukannya undang-undang yang mengatur pemerintah daerah, telah memiliki kriteria khusus atau tertentu, ada yang menyebut dengan tolak ukur objektif normatif dan berdasarkan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang nomor 1 tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968, Undang-undang nomor 5 tahun 1974 dan kriteria-kriteria tertentu atas perda.

<sup>68</sup> <https://pewe.id/pasar-tradisional-menurut-para-ahli/>

<sup>69</sup> <https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertianfungsiadanjenisjenispengawasan.html>, diakses pada sabtu, 27 Februari 2021, pukul 14.47 WIB

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam peraturan perundang-undangan tertentu, seperti undang-undang nomor 11 tahun 1957, dan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 telah ditentukan secara tegas dimana perda dapat berlaku setelah sebelumnya dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang. Menurut Soehini bahwa, Pelaksanaan Pengawasan terhadap perda oleh pejabat yang berwenang selama ini selain memperhatikan kriteria khusus, dan alasan-alasan dalam rangka mencegah pelaksanaan pengawasan tersebut, juga dilakukan berdasarkan padakriteria-kriteria yang ditentukan, antara lain dalam bentuk Surat Menteri Dalam Negeri yang dikaitkan dengan syarat teknis dan proses Perundang-undangan atau bentuk luar dari suatu Perda. Pelaksanaan pengawasan terhadap Perda ini hanya dilakukan perubahan pada susunan konsideran dan bahasa, sementara asas-asas formal dan asas-asas materil maupun “kriteria umum” serta asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada umumnya tidak diperhatikan.

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berfungsi untuk memberi pengaruh dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan bernegara (*direktif*), membina kearah kesatuan bangsa (*integratif*), pemeliharaan dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*stabilitatif*) dan penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun menjaga tindakan warga dalam kehidupan bernegara dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermasyarakat (*perspektif*), upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan (*korektif*)<sup>70</sup>

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional perusahaan. Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.<sup>71</sup>

Adapun pengawasan terhadap pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Siak agar dalam operasionalnya tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum. Untuk mewujudkan hal tersebut, dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan sebelum kegiatan berlangsung yaitu preventif dan pengawasan represif. Pengawasan ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yang membantu tugas Bupati dalam menyelenggarakan pembinaan, pengawasandalam menegakkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pengawasan Pasar Rakyat, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban dan pengawasan atas perintah dan izin Kabupaten Siak. Dalam melaksanakan pengawasan Pasar Rakyat Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki Standar operasional tetap. Satuan polisi

---

<sup>70</sup> *Ibid.*,

<sup>71</sup> *Ibid.*

Pamong Praja hanya menyesuaikan dengan program kerja instansi dimana dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

## **F. Teori Pengawasan**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelaskan M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Didalam hukum administrasi negara arti penting pengawasan merupakan bagian dari bentuk mencegah timbulnya penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan, dan menindak penyimpangan yang terjadi.<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Jurnal Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung, Volume VII Nomor 3, September 2010, h.157



## 2. Bentuk-bentuk Pengawasan

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah<sup>73</sup>:

- a. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- b. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu<sup>74</sup>:

### a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat

<sup>73</sup><https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertianfungsiandanjenisjenispengawasan.html>, diakses pada sabtu, 27 Februari 2021, pukul 14.47 WIB

<sup>74</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.”

Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal<sup>75</sup>

c. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).<sup>76</sup>

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

### 3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya juga sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat. Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.<sup>77</sup>

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berfungsi untuk memberi pengaruh dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan bernegara (*direktif*), membina kearah kesatuan bangsa (*integratif*), pemeliharaan dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*stabilitatif*) dan penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun menjaga tindakan warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (*perspektif*), upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan (*korektif*)<sup>78</sup>

<sup>77</sup> Isnawati, *Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Samarinda: Fakultas Hukum, 2017), h. 24

<sup>78</sup> *Ibid.*



Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional perusahaan.

Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik (feed back) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.<sup>79</sup>

#### 4. Asas-asas Pengawasan<sup>80</sup>

- a. Asas tercapainya tujuan (*Principle Of Assurance Of Objective*), artinya pengawasan harus ditujukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana.
- b. Asas efisiensi pengawasan (*Principle Of Efficiency Of Control*), artinya pengawasan itu efisien, jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan.
- c. Asas tanggung jawab pengawasan (*Principle Of Control Responsibility*), artinya pengawasan hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
- d. Asas pengawasan terhadap masa depan (*Principle Of Future Control*),

---

<sup>79</sup> *Ibid,*

<sup>80</sup> *Ibid,*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

artinya pengawasan yang efektif harus ditujukan kearah pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang.

- e. Asas pengawasan langsung (*Principle Of Direct Control*), artinya teknik control yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik.
- f. Asas refleksi rencana (*Principle Of Reflection Plans*), artinya pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana.
- g. Asas penyesuaian dengan organisasi (*Principle Of Organization Suitability*), artinya pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi.
- h. Asas pengawasan individual (*Principle Of Individual Of Control*), artinya pengawasan dan teknik pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer.
- i. Asas standar (*Principle Of Standard*), artinya pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.
- j. Asas pengawasan terhadap strategis (*Principle Of Strategic Point Contol*), artinya pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis terhadap perusahaan.
- k. Asas kekecualian (*Exception Of Principle*), artinya efisiensi dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pengawasan membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian.

- l. Asas pengawasan fleksibel (*Principle Of Flexibility Of Control*), artinya pengawasan harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.
- m. Asas peninjauan kembali (*Principle Of Riview*), artinya sistem pengawasan harus ditinjau berkali-kali, agar sistem yang digunakan berguna untuk pencapaian tujuan.
- n. Asas tindakan (*Principle Of Action*), artinya pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, staffing dan directing.

## 5. Dasar Hukum Pengawasan

Ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu filsafat yang dianut suatu bangsa tertentu, agama yang mendasari seorang tersebut, kebijakan yang dijalankan, anggaran pembiayaan yang mendukung, penempatan pegawai dan prosedur kerjanya, serta kemantapan koordinasi dalam organisasi. Dasar hukumnya Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terdiri dari<sup>81</sup>:

---

<sup>81</sup> Ibid,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atasan langsung baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;
2. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan. Pengawasan yang dimaksud dalam butir (a) adalah merupakan pengawasan atasan langsung, sesuai dengan bunyi pasal 3 sebagai berikut: “Pimpinan semua satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya masing masing”;
3. Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan<sup>82</sup>:
  - a. Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula;
  - b. Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam 10 pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
  - c. Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya;
  - d. Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
  - e. Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan

---

<sup>82</sup> *Ibid*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;

- f. Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.



## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pasar Rakyat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Dan pembinaan Pasar Rakyat Pada Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib belum dapat di jalan kan dan belum maksimal dalam pelaksanaanya sebagai mana mestinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 karena jika peraturan tersebut dapat di terapkan dengan sebagaimama mestinya ini akan lebih menunjang perekonomian masyarakat dan tercipta nya pasar rakyat yang bersih, nyaman dan hygienis yang sesuai SOP.
2. Pengawasan pengelolaan Pasar Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Pada Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib tidak berjalan, karena pasar-pasar yang tidak terdaftar pada Dinas perdagangan dan Perindustrian tidak di awasi karena pasar tersebut tidak terdaftar. Kemuidan begitu juga dengan Satuan Polisi Pamong Praja pasar-pasar yang tidak terdaftar juga tidak dilakukan pengawasan karena tidak ada instruksi dari Dinas terkait. Sehingga sampai saat ini tidak ada Satuan Polisi Pamong Praja atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dinas terkait melakukan pengawasan di pasar rakyat yang ada di Desa Buatan II dari awal pasar berdiri hingga sekarang.

3. Faktor penghambat Penerapan Peraturan Pengelolaan Pasar Rakyat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Dan pembinaan Pasar Rakyat Pada Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib; a) Kurangnya sosialisasi; b) Minimnya anggaran; dan c) Kurangnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan pasar.

## B. Saran

Dengan adanya hasil penelitian ini terhadap Pengelolaan Pasar Rakyat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Pada Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Desa Buatan Ii Kecamatan Koto Gasib dapat membantu pengelolaan pasar lebih baik lagi, dengan demikian maka penulis mencoba untuk memberikan saran terutama kepada diri sendiri, pengelola pasar, masyarakat setempat serta para pedagang.

1. Bagi peneliti sendiri khususnya dengan adanya penulisan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan menambah ilmu pengetahuan.
2. Kepada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Siak hendaknya lebih mengencarkan penyuluhan dan sosialisas tentang Perda Kabupatn Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Dan Toko Swalayan Kepada seluruh kepala Pemerintahan Kecamatan dan Desa seluruh Kabupaten Siak agar perda ini dapat di jalankan

sebagaimana mestinya, mengingat dan menimbang perda tersebut sudah berjalan kurang lebih selama 3 tahun dan masih banyak pasar rakyat yang belum di kelolah oleh kepala daerah setempat.

3. Kepada Pengurus pasar rakyat Desa Buatan II Agar lebih berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam Pengelolaan pasar rakyat.
4. Kepada Pedagang agar tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan di pasar rakyat yang berada di Desa Buatan II, karena pasar tersebut berada di tengah-tengah permukiman masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009
- A.A Ketut Sri Candrawati, *Pasar Modern dan pasar Tradisional Dalam Gaya Hidup Masyarakat Kabupaten Tabanan Provinsi Bali*, Bali : STIA : 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta;Raja Grafindo, 2011
- C.S.T Kansil, Cristine ST Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,2014
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika offset, 2002
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009
- Istijabatul Aliyah *Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan*, Cakra Wisata Vol 18 Jilid 2 Tahun 2017
- Isnawati, *Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Samarinda: Fakultas Hukum, 2017
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*, Bandung: Alfabeta, 2020,
- Nur Faeni Ulyati, *Strategi Pemasaran Pedagang Pasar Tradisional Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015
- Marios P, *Angipora, Dasar-dasar pemasaran*, Cet 2 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- M. Djunaidi Ghany, Fauzan Al-manshur, *Matodologi Penelitian Kualitatiif*, Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2016
- Philip Kotler & A.B Susanto, *Manajemen Pemasaran Di Indonesia analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, Jakarta: Salemba Empat, 2000

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rismayani, *Manajemen Pemasaran*, Bandung: Mizzan, 1999

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cv Al-Fabeta 2005

Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010

Umar, *Metode Riset Bisni*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003

## B. Jurnal

Azlan Thamrin, Dikutip dari Jurnal Al-Adalah: Jurnal Politik hukum dan islam, *Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan*, Vol. 4, No. 1, Januari 2019

Caroline Paskarina, dkk *Laporan Penelitian Penelitian Peneliti Muda (Litmud) Unpad Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Di Kota Bandung*, Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah Universitas Padjadjaran, November, 2007

Heru Sulistiyo, Budi Cahyono, *Model Pengembangan Pasar Tradisional Menuju Pasar Sehat Di Kota Semarang*, Ekobis Vol, No 2, Juli 2010

Husin Ilyas, Afif Syarif dan. Netty, *Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember 2012

Jurnal Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung, Volume VII Nomor 3, September 2010

M. Rendi Aridhayandi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 48, No.4 Tahun 2018

## C. Internet

<https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertianfungsiandanjenisjenispengawasannya.html>, diakses pada sabtu, 27 Februari 2021, pukul 14.47 WIB



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://pewe.id/pasar-tradisional-menurut-para-ahli/> diakses pada sabtu, 27 Februari 2021, pukul 16.47 WIB

<http://eprints.mercubuanayogya.ac.id/1084/2/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf> diakses pada sabtu, 27 Februari 2021, pukul 15.47 WIB

<http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1> diakses pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 02.33 WIB

#### D. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"PENGELOLAAN PASAR RAKYAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SIAK NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT PADA PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI DESA BUATAN 11 KEMACATAN KOTO GASIB"* yang ditulis oleh :

Nama : **SUHENDRA**  
 NIM : 11627104458  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 09 Agustus 2021  
 Waktu : 13:00 WIB  
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQSAH**

Ketua  
**Asril, SH., MH**

Sekretaris  
**Syamsurizal, SE., M.Sc. Ak**

Penguji I  
**Dr. Hj. Hertina, M.Pd**

Penguji II  
**Dr. Muhammad Darwis, SH**

Mengetahui:  
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalikus, S.Ag.**  
 NIP. 19750801 200701 1 023





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SUHENDRA

NIM : 11627104458

Program Studi: ILMU HUKUM

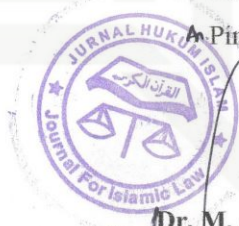
Judul : *Pengelolaan Pasar Rakyat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Pada Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Desa Buatan Ii Kecamatan Koto Gasib*

Pembimbing : Dr. H., Maghfirah, M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Agustus 2021

A. Pimpinan Redaksi



Dr. M. Alif Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.